

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan bagaimana kualitas hidup dari suatu keluarga. Semakin baik tingkat kesejahteraan suatu masyarakat maka semakin baik pula kualitas hidup yang mereka jalani (Rosni, 2017). Memiliki kehidupan yang sejahtera dan berkualitas merupakan harapan bagi setiap masyarakat. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, masyarakat dan pemerintah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, masyarakat berupaya untuk meningkatkan taraf hidup salah satunya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, penyelenggara kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Setiawan, 2017).

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah juga berupaya melalui pembangunan ekonomi, dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu transformasi secara sengaja melalui kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan ekonomi mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan secara mutlak diperlukan oleh suatu negara baik untuk meningkatkan taraf hidup maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Fajar dan Mulyanti, 2019). Pembangunan ekonomi menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat

dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya sehingga berkaitan dengan peran masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.

Kesejahteraan erat kaitannya dengan pembahasan kemiskinan, di Indonesia kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai menurut data Badan Pusat Statistik tercatat pada tahun 2021 Indonesia memiliki 26.50 juta jiwa penduduk yang tergolong masyarakat miskin (Karimi, Mulyani, Murialti, & Tibrani, 2023), salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, selama ini pemberdayaan masyarakat di Indonesia masih berfokus pada wilayah daratan, padahal jika dilihat dari kondisi wilayahnya yaitu sebagai negara maritim yang mana luas lautan mendominasi sekitar $\frac{2}{3}$ luas wilayah Indonesia (Retnowati, 2011), masyarakat wilayah pesisir juga memerlukan pemberdayaan, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat pesisir yang berada dalam kondisi kemiskinan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan besarnya potensi pesisir pantai yang seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Sumur merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Pandeglang yang memiliki jumlah pulau sebanyak 29 pulau. Lokasi Kecamatan Sumur berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Selat Sunda merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 572 yang mempunyai potensi perikanan yang melimpah. Hal ini dikarenakan Selat Sunda merupakan daerah pertemuan antara Samudera Hindia dan Laut Jawa yang merupakan sumber nutrient (Tarigan, Sasongko, Cahyadi, Yonanto, & Rahayu, 2020). Selat Sunda memiliki banyak ikan hasil tangkapan yaitu ikan lemuru, tembang, teri, tongkol, peperek, layang dan lain-lain (Boer & Kamal, 2016). Dengan demikian keuntungan lokasi Kecamatan Sumur terkait lokasi memiliki pengaruh yang baik untuk menunjang kesejahteraan nelayan terutama dalam hal potensi perikanan. Namun, dengan potensi yang melimpah tersebut ternyata tidak menjamin masyarakatnya hidup sejahtera. Kecamatan Sumur memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, berikut merupakan data tahapan kesejahteraan berdasarkan Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1. Tahapan Keluarga Sejahtera Kecamatan Sumur

No	Desa	Tahapan Keluarga Sejahtera				
		Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus
1	Ujungjaya	468	343	240	-	-
2	Tamanjaya	386	336	64	-	-
3	Cigorondong	273	273	65	-	-
4	Tunggaljaya	346	344	144	-	-
5	Kertamukti	364	221	261	-	-
6	Kertamukti	478	228	256	-	-
7	Sumberjaya	490	258	250	-	-
Jumlah		3720	2003	1280	-	-

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2020)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 di Kecamatan Sumur terdapat 7003 keluarga yang tercatat dalam tahapan keluarga sejahtera. Sebanyak 3720 keluarga yang termasuk pada golongan keluarga pra sejahtera. Jika diasumsikan 1 keluarga memiliki 4 anggota keluarga maka sebanyak 14.880 orang yang termasuk keluarga pra sejahtera. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi indikator kebutuhan dasar keluarga (Rosni, 2017). Tahapan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya namun belum mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya. Sedangkan keluarga sejahtera II adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga. Tahapan lainnya yang belum ada di Kecamatan Sumur adalah keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi indikator aktualisasi diri (*selfesteem*) dan keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya.

Wilayah pesisir diketahui memiliki keragaman potensi sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang sangat tinggi, Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yaitu potensi perikanan yang melimpah. Terdapat sekitar 7000 spesies ikan hidup di lautan Indonesia dengan potensi lestari sebesar 6126 juta ton (Oktaviana, 2021). Oleh karena itu mayoritas masyarakat pesisir menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian utama. Pada tahun 2016, tercatat Indonesia memiliki 2,26 juta nelayan yang 51,43% di antaranya merupakan nelayan yang bergantung penuh (*full time*) pada

perikanan tangkap dan laut (BPS, 2018). Jumlah nelayan di Kecamatan Sumur yaitu sebanyak 1729 orang yang tersebar di setiap desanya. Produksi perikanan Kabupaten Pandeglang rata-rata 17031 kg /tahun yang tersebar di 8 Tempat Pelelangan Ikan, berikut merupakan jumlah produksi perikanan laut dari tahun 2019-2021.

Tabel 1. 2 Jumlah Produksi Perikanan Laut Provinsi Banten

Kab/Kota	Perikanan Laut (Ton)		
	2019	2020	2021
Kab. Pandeglang	130.324	27.496,41	27.665
Kab. Lebak	11.285	9.922,12	6.740
Kab. Tangerang	20.383	20.784,34	21.088
Kab. Serang	7.542	6.705,98	7.782
Kota Tangerang	-	-	-
Kota Cilegon	5.320	224,51	238,50
Kota Serang	5.200	3.120,39	5.821,47
Kota Tangerang Selatan	-	-	-

(Sumber : SIPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022)

Jika dilihat dari tabel 1.2 terlihat bahwa produksi perikanan laut pada tahun 2020 terjadi penurunan, tercatat di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan sebesar 79% , Kabupaten Lebak menurun 13%, Kabupaten Serang menurun sebanyak 12%, Kota Cilegon menurun 96%, dan Kota Serang menurun sebanyak 40%. Penurunan produksi ini bukan hanya terjadi di Provinsi Banten saja melainkan di daerah pesisir di beberapa provinsi di Indonesia seperti Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mereka hanya mampu memproduksi sebanyak 900 ribu ton, padahal pada tahun-tahun sebelumnya dapat mencapai 1 juta ton. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh menyebarnya virus covid-19. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perikanan yaitu banyak pengusaha ikan skala kecil mengalami kesulitan, khususnya ketika dilakukan pembatasan sosial (*social distancing*) yang menghambat distribusi produk ikan ke konsumen keadaan tersebut diperparah dengan adanya penurunan permintaan dan harga ikan.

Kondisi wilayah yang sangat potensial seharusnya dapat menjadikan masyarakat pesisir sejahtera, jumlah hasil tangkapan adalah faktor utama jumlah pendapatan yang akan diperoleh nelayan, semakin banyak hasil tangkapan yang didapat maka semakin banyak pendapatan yang akan

diperoleh nelayan. Besarnya pendapatan nelayan juga menentukan tingkat kesejahteraan nelayan. Penurunan hasil perikanan Kabupaten Pandeglang yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh nelayan. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan sumberdaya laut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan yang memiliki pendapatan rendah.

Nelayan merupakan penyumbang terbesar dalam hal kemiskinan di Indonesia, pada tahun 2015 terdapat 7,87 Juta masyarakat miskin dan 2,2 Juta jiwa masyarakat penduduk nelayan sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia (Akbar, 2017). Berdasarkan jenisnya nelayan terbagi atas 3 karakteristik yaitu nelayan buruh, juraga, dan perorangan. Karakteristik nelayan yang identik dengan kemiskinan adalah nelayan buruh, pada dasarnya isu kemiskinan pada nelayan bukan hanya terjadi karena ketergantungan pada sumber daya perikanan, tetapi juga karena faktor sosial kelembagaan dan sistem ekologi-sosial. Persoalan ekologi yang dihadapi oleh nelayan adalah cuaca yang sulit diprediksi, degradasi lingkungan daerah tangkapan, serta tangkapan yang fluktuatif (Helmi dan Satria, 2012). Sementara itu, persoalan sosial yang menjadikan nelayan miskin adalah faktor struktural (lapisan kelas pada kelompok nelayan) (Masrial, 2018), yaitu kekurangan alternatif pendapatan dan kesulitan mencari penghidupan alternatif. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan terkesan sangat ironi disatu sisi mereka memiliki kekayaan sumberdaya laut yang melimpah sedangkan disisi lain tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi mereka pada umumnya masih rendah dan sangat sederhana oleh karena itu taraf kesejahteraanyapun masih rendah.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan diperlukan adanya data atau informasi terkait permasalahan kesejahteraan, untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran secara jelas dan objektif. Baik itu gambaran mengenai aspek sosial maupun ekonomi. Kriteria atau indikator tingkat kesejahteraan dapat dianalisis berdasarkan parameter yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang meliputi parameter pendapatan, pengeluaran, keadaan tempat

tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Melihat urgensi permasalahan kemiskinan yang bertolak belakang dengan potensi kekayaan sumberdaya laut, penelitian terkait kesejahteraan perlu dilakukan, Kecamatan Sumur sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan yang besar namun memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, menjadi alasan pemilihan wilayah kajian, Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti mencoba meneliti bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan dengan menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti mengambil sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang muncul dan perlunya pembatasan kajian penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik nelayan di Kecamatan Sumur di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang ?
3. Apa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis karakteristik nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang
2. Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang
3. Untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti mengenai indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, meningkatkan kemampuan analisis, dan membantu mengatasi permasalahan yang kompleks.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait kesejahteraan nelayan dan dapat menjadi evaluasi bagi masyarakat nelayan sehingga mereka dapat mencari solusi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan hidupnya.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran terkait tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan maksimal. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan pendekatan yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan, sehingga pembuatan kebijakan, program, dan proyek yang direncanakan untuk masyarakat nelayan benar-benar efektif dan sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

d. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Definsi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan judul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang” agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam penafsiran judul tersebut, maka peneliti memberikan definisi konsep tersebut diatas, diantaranya yaitu :

1. Nelayan

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau biota laut lainnya (binatang air atau tanaman air) (Sofiyanti dan Suartini, 2016). Beberapa kriteria bukan termasuk kedalam nelayan diantaranya adalah pembuat jaring, pengangkut ikan dari perahu atau kapal. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002), Nelayan di Kecamatan Sumur berjumlah 1729 orang yang tersebar disetiap desanya. Produksi perikanan Kabupaten Pandeglang rata-rata 17031 kg /tahun yang tersebar di 8 Tempat Pelelangan Ikan. Nelayan-nelayan tersebut terbagi menjadi nelayan juragan, nelayan pemilik perahu dan nelayan buruh.

2. Kesejahteraan Nelayan

Kesejahteraan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan disuatu negara. Konsep kesejahteraan dan Indikator yang digunakan dalam penelitian adalah indikator yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, Tingkat kesejahteraan nelayan dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Dengan indikator diantaranya adalah pendapatan, pengeluaran, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan keluarga, kemudahan akses kesehatan, kemudahan menyekolahkan anak, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Berdasarkan data sekunder Kecamatan Sumur pada tahun 2020 memiliki

3720 keluarga yang termasuk pada keluarga pra sejahtera atau keluarga yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Karakteristik Nelayan

Karakteristik adalah ciri-ciri yang membedakan atau khas dari suatu individu, seperti pada aspek demografi yaitu jenis kelamin, umur serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, status ekonomi dan sebagainya (Budi, 2015). Nelayan di Kecamatan Sumur memiliki karakteristik cukup beragam. diantaranya berdasarkan usia (produktif atau tidak produktif), jenis kelamin, sumber pendapatan (nelayan tetap, nelayan sambilan utama, nelayan sambilan tambahan, dan nelayan musiman) kepemilikan kapal dan alat tangkap (nelayan juragan, nelayan buruh, dan nelayan perorangan), pengalaman, pendidikan, jangkauan melaut, masalah yang dihadapi, dan produktivitas.